

**PENGARUH PERENCANAAN PARTISIPATIF TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA TOUNDANOUW SATU
KECAMATAN TOULUAAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**EOUDIA J. RUMENGA
JOHNY H. POSUMAH
SALMIN DENGO**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISPOL, Universitas Sam Ratulangi**

Email : euodiajrumengan@gmail.com

Absreact : The purpose of this study was to determine the effect of participatory planning on community participation in the Development of the Village of Toundanouw Satu Sub-district Toul Toul Minahasa District of Southeast. This research uses quantitative methods. The research respondents were 30 people from Toundanouw Desa One community who were taken by random sampling. The instruments and data collection techniques used were questionnaires and assisted with structured interviews (interview guide). The analysis technique used to test the hypothesis of simple correlation statistical analysis or product moment chore. Based on the results of data analysis, conclusions can be drawn: (1) Participatory planning has a positive and significant impact on community participation in village development. The better participatory planning in village development, the higher the community participation. (2) Participatory planning in village development has a correlation and a significant determination / determination power on community participation. Significant changes in the level of community participation in village development are determined by participatory planning in village development. Based on these conclusions, it is recommended that participatory planning in village development should involve all elements of stakeholders in the community, namely not only village officials, BPD, and LPMD, and community leaders / leaders, but also representatives of community groups in villages such as groups farmers, women's groups, youth groups, and others.

Keywords : Participatory Planning, Village Development, Community Participation.

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan partisipatif terhadap partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden penelitian adalah sebanyak 30 orang masyarakat Desa Toundanouw Satu yang diambil secara random sampling. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan dibantu dengan wawancara terstruktur (interview guide). Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis analisis statistik korelasi sederhana atau koreasi product moment. Berdasarkan hasil analisis data ditarik kesimpulan : (1) Perencanaan partisipatif punya pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Semakin baik perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. (2) Perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa punya korelasi dan daya determinasi/penentu yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Perubahan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara signifikan ditentukan oleh perencanaan partisipatif pada pembangunan desa tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan bahwa Perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa hendaklah melibatkan semua elemen pemangku kepentingan dalam masyarakat, yaitu tidak hanya aparat desa, BPD, dan LPMD, dan tokoh/pmuka masyarakat, tetapi juga perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan lainnya.

Kata Kunci : Perencanaan partisipaif, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAAN

Siagian (2000) juga secara luas memberi pengertian perencanaan sebagai berikut :

- a. Perencanaan pada hakekatnya merupakan kegiatan berpikir, karena merencanakan memang didahului oleh konsep berkonseptualisasi usaha sebelum bertindak;
- b. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan dimasa depan;
- c. Perencanaan berarti meletakkan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai usaha dimasa mendatang dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan arah perubahan yang diduga akan terjadi;
- d. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan dan usaha menghubungkan-hubungkan fakta untuk dijadikan bahan dalam membuat berbagai pra anggapan mengenai masa depan yang akan dihadapi untuk kemudian dituangkan dalam program kerja dan kegiatan operasional yang dirasakan perlu dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya;
- e. Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Perencanaan juga berarti pengalokasian yang sistematis dan rasional dari berbagai sarana dan prasarana kerja yang sifatnya terbatas untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Menurut Terry (2000), ada beberapa keuntungan dari perencanaan, antara lain : (1) timbulnya aktivitas-aktivitas teratur yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran; (2) perencanaan menunjukkan perlu diadakannya perubahan pada masa yang akan datang; (3) perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang akan terjadi

kemudian; (4) perencanaan memberikan sebuah dasar atau landasan untuk melakukan pengawasan; (5) perencanaan memperbesar dan mengembangkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas.

Istilah partisipasi merupakan terjemahan dari istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris "*participation*". Menurut Kamus Bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai "pengambilan bagian" atau "pengikutsertaan" (Poerwadarminta, 2000). Sehingga itu partisipasi mengandung makna semua pihak yang terkait mengambil bagian atau ikutserta secara aktif berdasarkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama (Marzuki, 2004). Bhattacharyya dalam Taliziduhu (2000) mendefinisikan partisipasi adalah pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Bornby dalam Theresia,dkk.(2015) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat Nelson dalam Bryant dan White (2005) mengemukakan, bahwa dalam rangka pembangunan terdapat dua jenis partisipasi, yaitu : pertama, ialah partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu kelompok, yang disebut partisipasi horizontal; dan kedua ialah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat sebagai keseluruhan dengan pemerintah, yang disebut partisipasi vertikal. Selanjutnya menurut Davis dalam Taliziduhu (2000), bahwa partisipasi atau keterlibatan kelompok masyarakat sebagai suatu kesatuan, disebut partisipasi kolektif; sedangkan keterlibatan individu-individu dalam kegiatan kelompok, disebut partisipasi individual.

Pendekatan partisipatif merupakan salah satu cara merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan di tingkat lokal (Nurman,

2015). Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa merupakan suatu paduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi atau peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan desa. Dalam pendekatan partisipatif, partisipasi masyarakat/rakyat diwujudkan pada setiap tahapan program/proyek pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut) dimana pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi landasan/dasar bagi bergulirnya program/proyek pembangunan desa (Ohama, 2002)

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa juga dianut dalam konsepsi pembangunan desa di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 : (1) Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. (2) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa; (3) Dalam menyusun rencana pembangunan desa (rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM-Desa, dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa atau RKP-Desa), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa; (4) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa; (5) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa; (6) Masyarakat desa berhak melakukan

pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Wahyudin (2004), konsep pembangunan partisipatif ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah mengakar dan budaya masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya.

Dari prasarvei yang dilakukan khususnya di Desa Toundanouw Kecamatan Touluaan Minahasa Tenggara masih terdapat kekemahan/kekurangan pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa, terutama dalam perencanaan pembangunan desa. Program-program pembangunan desa cenderung masih lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa, sedangkan masyarakat lebih diharapkan partisipasinya dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ditetapkan tersebut. Secara formal pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa (RPJMD dan RKP-Desa) memang menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa, namun belum banyak melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dilibatkan dalam musrembang desa terutama hanya mereka yang termasuk dalam BPD dan LPMD, sementara para pemangku kepentingan lainnya yang ada di desa seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di desa belum banyak dilibatkan. Penentuan keputusan rencana program pembangunan desa dalam musrembang desa sangat didominasi oleh kepala desa.

Kendala yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa tersebut dari hasil prasarvei adalah : (1) Masih kurangnya/rendahnya komitmen pemerintah desa (kepala desa) untuk

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa sengaja tidak banyak melibatkan atau membatasi mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan rencana dan pelaksanaan program pembangunan desa, dengan maksud agar program-program pembangunan desa yang ditetapkan sesuai dengan keinginan pemerintah desa. (2) Belum berfungsinya secara maksimal lembaga kemasyarakatan desa terutama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan di desa. Meskipun di Desa Toundanouw ada LPMD, namun lembaga ini belum banyak berfungsi menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa mereka. LPMD masih cenderung berpihak kepada kepentingan pemerintah desa dari pada masyarakat desa; (3) Masih lemahnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga di desa (Kepala Desa/Perangkat Desa, BPD, dan LPMD dalam penerapan pendekatan partisipatif pada perencanaan pembangunan desa.

Tidak diterapkannya dengan baik perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa dapat menyebabkan rencana program-program pembangunan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa tidak atau kurang sesuai dengan harapan/keinginan dan kebutuhan/kepentingan masyarakat desa. Kurang atau tidak sesuainya program-program pembangunan desa dengan harapan, keinginan, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat menyebabkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa akan berkurang atau tidak terwujud secara optimal sebagaimana yang diharapkan, baik dalam proses pengambilan keputusan (perencanaan), dalam pelaksanaan program, dalam monitoring dan evaluasi program, dan dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan des itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif oleh karena penelitian ini bermaksud mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebagaimana dikatakan oleh Danim (2000) merupakan metode pengumpulan data yang bersifat deskriptif, asosiatif, dan logika sebab akibat, mengenai peristiwa atau fenomena melalui sejumlah unit atau individu.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil analisis data dengan analisis statistik regresi sederhana dan korelasi sederhana (korelasi product moment arau r-pearson) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan variabel perencanaan partisipatif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal itu berarti hipotesis penelitian dapat diterima/teruji dengan sangat meyakinkan berdasarkan data empirik. Untuk menjelaskan pengertian dan makna dari hasil pengujian hipotesis tersebut maka perlu dilakukan pembahasan hasil penelitian seperti diuraikan berikut ini.

Berdasarkan analisis regresi linier didapat persamaan regresi linier tentang hubungan fungsional variabel "perencanaan partisipatif" (X) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y) di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu : $\hat{Y} = 20,27 + 0,6727 X$.

Pada persamaan regresi tersebut jelas bahwa koefisien arah regresi (b) adalah bertanda positif yaitu sebesar $b = +0,6727$. Oleh karena nilai koefisien arah regresi (b) bertanda positif maka hal itu menunjukkan bahwa hubungan fungsional/pengaruh variabel perencanaan partisipatif (X) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y) di Desa Toundanouw Satu Kecamatan

Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah positif; dengan kata lain bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan analisis regresi tersebut bahwa besaran pengaruh variabel perencanaan partisipatif (X) terhadap partisipasi masyarakat (Y) adalah sebesar 0,6727 skala per unit, atau 1 : 0,6727. Ini mempunyai pengertian bahwa peningkatan pada perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa (X) sebesar 1 skala akan menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat (Y) sebesar 0,6727 skala; dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peningkatan kinerja sebesar 100 skala akan diikuti oleh peningkatan kepuasan masyarakat sebesar 0,6727 skala.

Selanjutnya, pada persamaan regresi linier tersebut menunjukkan nilai koefisien konstanta (a) adalah sebesar 20,27; ini artinya bahwa tanpa ada peningkatan dalam perencanaan partisipatif maka partisipasi masyarakat hanya ada sebesar 20,27 skala; dan apabila ada peningkatan sebesar 1 skala pada perencanaan partisipatif maka partisipasi masyarakat akan meningkat sebesar 0,6727 skala.

Hasil analisis regresi sederhana tersebut juga didukung oleh hasil analisis korelasi sederhana (*product moment correlation*) yang menunjukkan adanya korelasi dan daya determinasi/pengaruh dari variabel perencanaan partisipatif (X) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y) di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil perhitungan analisis statistik di atas bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,7178 dan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,5152 atau 51,52%. Nilai koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel perencanaan partisipatif (X) dengan partisipasi masyarakat (Y); sedangkan nilai koefisien determinasi (r^2) menunjukkan

besaran daya penentu/pengaruh variabel perencanaan partisipatif (X) terhadap partisipasi masyarakat (Y).

Nilai korelasi korelasi $r = 0,7178$ tersebut berada pada kategori kuat yaitu berada pada nilai 0,60 - 0,799 (kategori kuat); ini mempunyai makna bahwa derajat korelasi variabel perencanaan partisipatif (X) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Y) di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah berada pada kategori kuat atau tinggi/erat.

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,5152 mempunyai makna bahwa perkembangan/peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 0,5152 atau 51,52% ditentukan oleh variabel perencanaan partisipatif, sedangkan sisanya sebesar 48,48% ditentukan oleh variabel lain diluar jangkauan penelitian ini.

Nilai koefisien korelasi ($r = 0,7178$) dan koefisien determinasi ($r^2 = 0,5152$) tersebut setelah dilakukan uji signifikan dengan rumus uji-t ternyata sangat signifikan karena nilai t-hitung = 5,453 adalah lebih besar dari nilai t-kritik pada taraf signifikan 0,01 yaitu $t_{0,99} = 1,313$. Ini artinya bahwa variabel perencanaan partisipatif berkorelasi dan mempunyai daya determinasi/pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil analisis regresi sederhana dan analisis korelasi product moment beserta pengujian signifikansinya dengan uji F dan uji-t tersebut secara bersama-sama menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa mempunyai hubungan fungsional dan pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan

Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Menurut Terry (2000) perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Lanjut dikatakan oleh Terry, bahwa perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang.

Jamiesson dalam Marzuki (2004) mengemukakan bahwa salah satu perspektif yang mendasari paradigma pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi masyarakat setempat, pola-pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Oleh karena itu menurut Jamiesson dalam Marzuki (2004) bahwa tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan partisipatif dalam semua tahapan/proses pembangunan desa ialah : (1) mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan desa; (2) menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan; (3) dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa; dan (4) munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya. Menurut Bryant dan White (2005) bahwa pendekatan partisipatif

(*bottom up*) dalam pembangunan desa sangat efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, karena : Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau *feed-back* kepada pihak pemerintah mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan, dan lainnya; Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutannya kepada masyarakat; Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) dapat terjadi tawar menawar, permufakatan atau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah; Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) dapat terjadi proses *exchange* antara masyarakat dan pemerintah. Kedua pendapat di atas dapat menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa dapat mendorong atau menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan/diuji dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “perencanaan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara”, dapat dinyatakan diterima atau dibuktikan kebenarannya secara sangat meyakinkan pada taraf signifikan 0,01 atau taraf kepercayaan/keyakinan 99%.

Oleh karena adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel perencanaan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi di masa depan apabila perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa dapat ditingkatkan; dengan kata lain apabila

perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat ditingkatkan dari kondisi yang ada sekarang ini, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan menjadi lebih baik lagi di masa depan.

Untuk meramalkan atau memprediksi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa depan sebagai dampak dari peningkatan perencanaan partisipatif, maka dapat dilakukan uji ketepatan prediksi menggunakan metode interpolasi yaitu memasukkan nilai/harga tertentu dari variabel perencanaan partisipatif dalam persamaan regresi hasil analisis data. Jadi, apabila nilai variabel perencanaan partisipatif yang ada seperti sekarang di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat ditingkatkan sebesar nilai score maksimum variabel tersebut hasil pengamatan, yakni = 68 (lihat lampiran tabulasi data atau raw score) , maka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di masa depan dapat dihitung seperti berikut ini :

$$\begin{aligned}\hat{Y} &= 20,27 + 0,6727 (68) \\ &= 20,27 + \\ &45,7436 \\ &= 66,01\end{aligned}$$

Hasil perhitungan ketepatan prediksi di atas menunjukkan bahwa apabila perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat ditingkatkan sebesar nilai score maksimum hasil pengamatan variabel tersebut (yakni 68) dari kondisi yang ada sekarang, maka dapat diprediksi akan terjadi peningkatan di masa depan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebesar 66,01 skala. Hasil perhitungan

prediksi tersebut dapat mengisyaratkan bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa berpengaruh nyata atau signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Keseluruhan hasil analisis statistik di atas dapat membenarkan teori yang dibangun sebagai landasan teoritis dari penelitian ini.

Sebagaimana telah diuraikan dalam kajian teoritis di atas bahwa pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa adalah pendekatan dimana partisipasi masyarakat/rakyat diwujudkan pada setiap tahapan program/proyek pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut) dimana pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi landasan/dasar bagi bergulirnya program/proyek pembangunan. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini ialah “keterlibatan penuh masyarakat” dalam setiap tahapan pembangunan disandarkan pada kemampuan diri sendiri (kemandirian), artinya proses pembangunan akan diperkuat oleh proses belajar yang terus menerus dalam masyarakat (proses dibangun berdasarkan pengalaman); artinya pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan masyarakat (Ohama,2002). Oleh karena itu, ada dua ciri penting dari pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa, yaitu : (1) adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan program; dan (2) bahwa masyarakat setempat sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program dengan dukungan pemerintah (Marzuki, 2004). Tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan partisipatif dalam semua tahapan/proses pembangunan desa ialah : (1) mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan

proses pembangunan desa; (2) menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan; (3) dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa; dan (4) munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya (Jamiesson dalam Marzuki,2004). Oleh karena itu menurut Bryant dan White (2005) bahwa pendekatan partisipatif (*bottom up*) dalam pembangunan desa sangat efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, karena : (1) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau *feed-back* kepada pihak pemerintah mengenai hal-hal menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan, dan lainnya. (2) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada masyarakat. (3) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) dapat terjadi tawar menawar, permufakatan atau kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. (4) Melalui pendekatan partisipatif (*bottom-up*) dapat terjadi proses *exchange* antara masyarakat dan pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Toundanouw Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata dapat membuktikan kebenaran pendapat teoritis tersebut yaitu bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa ternyata berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dan dibahas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan partisipatif punya pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ini

artinya bahwa semakin baik perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. Perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa punya korelasi dan daya determinasi/penentu yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Ini artinya bahwa perubahan (peningkatan atau penurunan) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara signifikan tergantung atau ditentukan oleh perencanaan partisipatif pada pembangunan desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, penulis memberikan yaitu perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa hendaklah melibatkan semua elemen pemangku kepentingan dalam masyarakat, yaitu tidak hanya aparat desa, BPD, dan LPMD, dan tokoh/pemuka masyarakat, tetapi juga perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan lainnya. Pada perencanaan partisipatif, hendaklah perwakilan kelompok-kelompok masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam mengemukakan gagasan-gagasan tentang rencana pembangunan desa, sedangkan pemerintah desa hendaklah lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, rencana program-program pembangunan desa akan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Wahyudin K., 2004,*Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Terry, G.R. 2000, *Asas-Asas Manajemen*, terjemahan, Bandung : Alurni

Siagian, S.P. 2000, *Filsafat Administrasi*,
Jakarta : Gunung Agung.

Poerwadarminta, S., 2000, *Kamus Umum
Bahasa Indonesia*, Jakarta :
PT.Gramedia.

Taliziduhu Ndraha, 2000, *Pembangunan
Masyarakat*, Jakarta : Bina Aksara

Bryant Coralie dan Louise White, 2005,
*Manajemen Pembangunan untuk
Negara-Negara Berkembang*,
terjemahan, Jakarta : LP3ES.

Marzuki M., 2004, *Pendekatan dan Proses
Pembangunan Partisipatif*, Modul
PKM, Jakarta : Departemen Dalam
Negeri.

Ohama, Y., 2000, *Kerangka Teoritis dan
Metode-Metode Praktis untuk
Participatory Local Social
Development*, Pelatihan Internasional
JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya.

Danim, S. 2000, *Pengantar Studi Penelitian
Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara

Sumber Lain (Dokumen) :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan
UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa.